

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 254-260
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18102702>

Teori Keseimbangan dalam Fisika dan Pemerintahan Islam: Mencari Titik Temu antara Keseimbangan Alam dan Keseimbangan Sosial dalam Konteks Negara Islam

The Theory of Balance in Physics and Islamic Governance: Exploring the Convergence of Natural Equilibrium and Social Balance within an Islamic State Context

Yusri Handayani^{1*}, Andi Aderus², Indo Santalia³

¹Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

^{2,3}Universitas Islam Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: yusrihandayani@unismuh.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hubungan antara konsep keseimbangan dalam fisika dengan penerapan pemerintahan Islam, serta bagaimana kedua konsep tersebut saling berkaitan dalam konteks negara Islam. Dalam fisika, keseimbangan tercapai melalui interaksi berbagai gaya dalam suatu sistem yang terus berusaha mencapai stabilitas, baik dalam sistem statis maupun dinamis. Hal ini memiliki kesamaan dengan upaya pemerintahan Islam untuk menjaga keseimbangan antara otoritas negara, hak individu, dan kewajiban sosial. Pemerintahan Islam menekankan pentingnya keadilan sosial yang tercermin dalam kebijakan negara yang berlandaskan pada hukum syariah, yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan sosial dengan memperhatikan hak-hak individu dan kepentingan masyarakat secara adil. Dalam studi ini, penulis menemukan bahwa pemerintahan Islam harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan dinamika sosial, mirip dengan prinsip keseimbangan dalam fisika yang selalu berusaha mencapai keadaan stabil meskipun ada perubahan. Kebijakan sosial-ekonomi seperti zakat dan wakaf berfungsi untuk mengurangi ketimpangan sosial, sementara prinsip moral dan etika syariah berperan penting dalam menjaga keseimbangan ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep keseimbangan dalam fisika memberikan perspektif yang bermanfaat untuk memahami dinamika pemerintahan Islam, yang tidak hanya statis tetapi juga dinamis dan adaptif terhadap tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Keseimbangan, Pemerintahan Islam, Fisika, Syariah, Keadilan Sosial.

Abstract

This research examines the relationship between the concept of equilibrium in physics and the implementation of Islamic governance, and how the two concepts relate to each other in the context of an Islamic state. In physics, equilibrium is achieved through the interaction of various forces within a system that continuously strives for stability, both in static and dynamic systems. This parallels the efforts of Islamic governments to maintain a balance between state authority, individual rights, and social obligations. Islamic governments emphasize the importance of social justice, reflected in state policies based on Sharia law, which aim to ensure social welfare by equitably considering individual rights and societal interests. In this study, the authors found that Islamic governance must be able to adapt to changing times and social dynamics, similar to the principle of equilibrium in physics, which always strives to achieve a stable state despite change. Socio-economic policies such as zakat and waqf serve to reduce social inequality, while the moral and ethical principles of sharia play a crucial role in maintaining this balance. This study concludes that the concept of equilibrium in physics provides a useful perspective for understanding the dynamics of Islamic governance, which is not merely static but also dynamic and adaptive to the demands of the times and the needs of society.

Keywords: Equilibrium, Islamic Governance, Physics, Sharia, Social Justice.

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 29 December 2025

INTRODUCTION

Dari sudut pandang Islam, pemerintahan didasarkan pada gagasan mendalam tentang keseimbangan antara agama, politik, dan masyarakat. Dalam fisika, gagasan keseimbangan menjelaskan bagaimana gaya dan massa bekerja bersama untuk menciptakan stabilitas. Dalam politik Islam, gagasan keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak individu serta masyarakat serupa.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami mekanisme bagaimana keseimbangan ini dibangun dan dipertahankan dalam kerangka pemerintahan Islam.

Sebagai ilmu alam, fisika sering mengajarkan kita tentang aturan dasar yang mengatur sistem yang berusaha mencapai keseimbangan, seperti hukum termodinamika atau mekanika. Prinsip-prinsip ini dapat dibandingkan dengan gagasan pemerintahan Islam, yang menempatkan keadilan, kesetaraan, dan harmoni di urutan teratas hal-hal yang harus terjadi antara negara dan rakyatnya. Dari sudut pandang Islam, negara bukan hanya otoritas politik; ia juga pengelola kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai-nilai agama. Agar kesejahteraan rakyat terwujud, harus ada keseimbangan antara faktor sosial, ekonomi, dan politik.

Fisika juga mengakui prinsip-prinsip keseimbangan dalam berbagai sistem dinamis yang berkaitan dengan interaksi antar berbagai elemen, baik dalam sistem tertutup maupun terbuka. Dalam negara Islam, hubungan antara agama dan negara juga harus didasarkan pada interaksi yang harmonis antara nilai-nilai agama, kebijakan negara, dan tujuan masyarakat. Dalam konteks ini, model pemerintahan Islam menekankan tidak hanya struktur kekuasaan yang tetap tetapi juga fluiditas, transformasi, dan adaptasi kekuasaan tersebut terhadap dinamika kontemporer, sambil tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip agama inti.

Dalam pemikiran Islam, hubungan antara agama dan negara dapat dibandingkan dengan gagasan keseimbangan dalam fisika. Pemerintahan Islam bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara otoritas negara dan kebebasan individu dalam kerangka hukum Syariah yang memprioritaskan keadilan dan kesejahteraan rakyat, mirip dengan bagaimana keseimbangan dicapai dalam fisika dengan mempertimbangkan gaya-gaya yang bekerja pada suatu sistem.

Secara umum, pemikiran Islam menyatakan bahwa hubungan antara agama dan negara membutuhkan pemahaman penuh tentang gagasan keadilan sosial, pemerintahan yang adil, dan bagaimana syariah digunakan dalam kehidupan negara. Dalam fisika, keseimbangan sering dianggap sebagai keadaan di mana semua gaya dalam suatu sistem saling menyeimbangkan, sehingga menghasilkan perubahan yang dapat diabaikan. Dalam pemerintahan Islam, tujuan utamanya adalah mencapai kesejahteraan sosial dengan memastikan hak-hak individu dan kelompok ditegakkan dalam parameter hukum syariah, sambil juga berpegang pada prinsip-prinsip agama yang menjadi dasar negara.

Abdurrahman menegaskan bahwa, dari sudut pandang Islam, negara mewujudkan nilai-nilai agama yang wajib dijunjung tinggi oleh penguasa secara adil dan merata (Abdurrahman, 2014). Islam mengatur hubungan antarmanusia dalam masyarakat dan mencakup peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan dan administrasi negara yang berlandaskan hukum ilahi. Dalam situasi ini, negara bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan sosial dan memastikan bahwa warganya dapat hidup rukun satu sama lain sesuai dengan ajaran agama.

Dalam Islam, model pemerintahan mencakup berbagai bagian yang didasarkan pada gagasan dasar seperti keadilan, kesetaraan, dan penggunaan hukum syariah. Untuk memahami keseimbangan dalam pemerintahan Islam, Anda perlu mengetahui tentang sistem hukum dan bagaimana agama memengaruhi pemerintah. Pemerintahan Islam menekankan perlunya stabilitas dan harmoni antara kekuasaan negara dan kebebasan individu. Ia juga menyatakan bahwa negara harus mengatur urusan publik untuk kepentingan bersama. Keseimbangan yang dimaksud adalah antara kekuasaan negara dan hak-hak individu, yang harus dihormati dan dilindungi.

Dalam teori fisika, gagasan keseimbangan berlaku untuk sistem statis dan sistem dinamis, yang berubah seiring waktu tetapi tetap berusaha mencapai keadaan keseimbangan. Ini sangat penting untuk cara kerja pemerintahan Islam, yang bukan hanya tentang mengendalikan struktur kekuasaan tetapi juga tentang kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dalam masyarakat, politik, dan ekonomi. Dalam sistem pemerintahan Kekhalifahan Islam, misalnya, ada upaya untuk mencapai keseimbangan antara

menegakkan ketertiban sosial dan melindungi hak-hak individu, seperti yang dikemukakan dalam bukunya tentang teori pemerintahan Islam (Al-Mawardi, 2015).

Dia menegaskan bahwa pemerintahan dalam Islam bukanlah absolut atau sewenang-wenang; pemerintahan harus didasarkan pada prinsip keadilan, yang dapat ditegakkan dengan menjaga keseimbangan antara kebijakan negara dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan keseimbangan penting baik dalam fisika maupun pemerintahan Islam karena hal itu berarti menemukan keadaan stabil yang tidak mudah diubah oleh kekuatan eksternal.

Fisika modern mengajarkan kita bahwa sistem dinamis dapat mencapai keseimbangan dengan melihat semua gaya dan interaksi antara bagian-bagian system (Faris, 2020). Dalam pemerintahan Islam, keseimbangan tidak hanya ada dalam kondisi statis; ia harus beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berkembang, selaras dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat. Faris merujuk pada teori syariah Islam, yang bertujuan untuk membangun sistem pemerintahan yang adil dan menyelaraskan dimensi agama, sosial, dan politik sebagai komponen fundamental yang mendefinisikan negara Islam.

Sebuah studi menunjukkan bahwa penerapan syariah Islam dalam pemerintahan harus menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, sambil menjamin bahwa kebijakan negara tidak merugikan salah satu pihak (Muqtadir, 2018). Pemerintahan Islam harus menjaga keseimbangan ini agar negara dan masyarakat tetap stabil. Ini berarti bahwa, seperti dalam fisika, di mana gaya-gaya bekerja bersama untuk menciptakan keseimbangan, dalam pemerintahan Islam, keseimbangan dicapai melalui interaksi kebijakan negara, agama, dan hak individu.

Pemikiran Islam secara khusus mengamati hubungan antara agama dan negara dalam hal bagaimana prinsip-prinsip syariah Islam harus digunakan dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, keseimbangan sangat penting untuk menjamin bahwa negara tidak hanya memegang otoritas politik tetapi juga bertanggung jawab untuk mengatur kehidupan sosial secara adil sesuai dengan doktrin agama. Keseimbangan ini terkait erat dengan bagaimana negara menggunakan kekuasaannya untuk membantu rakyat, yang didasarkan pada Al-Quran, Hadits, dan kesepakatan para ulama (ijma').

Dalam Islam, pemerintah bukanlah sistem otoriter; sebaliknya, pemerintah mengutamakan keadilan dan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial. Al-Qardawi mengatakan bahwa dalam pemerintahan Islam, negara bertanggung jawab untuk melindungi kesejahteraan rakyat dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, tidak peduli seberapa kaya atau miskin mereka. Negara melindungi keseimbangan ini dengan membuat undang-undang dan menegakkannya, serta melalui kebijakan sosial-ekonomi (Al-Qardawi, 2000).

Gagasan keseimbangan ini mirip dengan gagasan kesetimbangan dalam fisika, di mana semua gaya yang bekerja pada suatu sistem harus saling menyeimbangkan agar tetap stabil. Dalam hal ini, model pemerintahan Islam mencoba menemukan keseimbangan antara tiga hal: (1) kekuasaan negara yang mengendalikan dan membimbing, (2) kebebasan individu yang dilindungi negara, dan (3) prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti di semua bidang kehidupan masyarakat.

Syamasuddin mengatakan bahwa keseimbangan ini dicapai dalam pemerintahan Islam dengan memastikan bahwa semua kebijakan negara sejalan dengan ajaran moral dan etika Islam. Hal ini sangat penting untuk mencegah pemerintah menjadi tirani atau membuat peraturan yang melanggar hak-hak rakyat. Syamsuddin mengatakan bahwa dalam negara Islam, agama dan negara terkait erat dan bekerja sama. Negara bukan hanya alat untuk kekuasaan; negara juga merupakan pengatur yang memperhatikan rakyat (Syamsuddin, 2016).

Dengan cara ini, pemerintah Islam berupaya menemukan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan aturan moral serta spiritual yang menurut agama harus diikuti oleh manusia. Misalnya, dalam hal kebijakan sosial dan ekonomi, negara-negara Islam berupaya menjaga keseimbangan antara distribusi kekayaan, kebutuhan dasar masyarakat, dan keadilan sosial melalui zakat (sedekah), wakaf (hibah), dan aturan ekonomi yang didasarkan pada gagasan keadilan. Seperti yang dikatakan Aslan,

kebijakan-kebijakan ini dimaksudkan untuk menjadikan masyarakat adil dan sejahtera, di mana setiap orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan layanan publik (Aslan, 2019).

RESEARCH METHODS

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*). Metode studi pustaka (*library research*) adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis data yang bersumber dari berbagai literatur tertulis, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi, laporan penelitian, dan sumber akademik lain yang relevan dengan objek kajian (Sugiyono, 2019). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis konsep-konsep pemikiran keislaman dan ilmu fisika secara mendalam, khususnya mengenai hubungan antara agama dan negara serta ilmu fisika. Sumber utama berasal dari artikel jurnal nasional. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan pendekatan komparatif untuk melihat persamaan, perbedaan, dan relevansi kedua konsep dalam konteks keindonesiaan.

RESULTS AND DISCUSSION

Studi ini bertujuan untuk meneliti interaksi antara agama dan negara dalam konteks pemikiran Islam dan untuk membangun kesamaan antara prinsip keseimbangan dalam fisika dan pelaksanaan pemerintahan Islam. Tinjauan dan analisis literatur mengungkapkan bahwa konsep keseimbangan dalam fisika menunjukkan kesamaan yang mencolok dengan upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara otoritas negara dan hak-hak individu dalam pemerintahan Islam.

1. Keseimbangan dalam Pemerintahan Islam

Al-Qardawi mengatakan bahwa pemerintahan Islam adalah tentang memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil dan bahwa negara bertanggung jawab atas keadilan dan kesejahteraan rakyat. Gagasan di balik ini adalah bahwa negara harus mengendalikan kehidupan sosial sesuai dengan hukum Syariah, yang membantu menemukan keseimbangan antara hak-hak manusia dan kewajiban mereka kepada Masyarakat (Al-Qardawi, 2000). Gagasan ini mirip dengan gagasan keseimbangan dalam fisika, di mana gaya-gaya dalam suatu sistem harus saling menyeimbangkan agar sistem tetap stabil.

Muqtadir menegaskan bahwa dalam negara Islam, keseimbangan ini dicapai melalui fungsi negara, yang menekankan tidak hanya pengaturan urusan politik tetapi juga pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Negara Islam berupaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pribadi dan kesejahteraan kolektif, yang mencakup alokasi sumber daya dan kekayaan yang adil (Muqtadir, 2018).

2. Keseimbangan antara Negara dan Individu

Tata kelola Islam menyeimbangkan kekuasaan negara dan hak-hak individu dengan melindungi kebebasan pribadi sekaligus mempertimbangkan kepentingan umum. Tata kelola Islam menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara hak individu untuk bebas dari penindasan dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial (Syamsuddin, 2016). Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa kebijakan negara memenuhi kebutuhan agama dan sosial.

Hal ini sangat mirip dengan teori fisika tentang keseimbangan dinamis, yang menyatakan bahwa suatu sistem berusaha mencapai keadaan stabil meskipun berubah seiring waktu. Dengan cara yang sama, pemerintahan Islam tidak kaku; ia berubah seiring waktu sambil tetap mengikuti aturan keadilan yang diajarkan Islam. Keseimbangan dinamis dalam fisika terjadi ketika gaya-gaya

dalam suatu sistem bekerja bersama dan berubah untuk membuatnya stabil. Hal ini mirip dengan bagaimana negara Islam berusaha mengubah kebijakannya untuk menjaga keseimbangan sosial dan politik tanpa mengabaikan moral agamanya (Faris, 2020).

3. Peran Negara dalam Menjaga Keseimbangan Sosial

Kebijakan tentang distribusi kekayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar melalui zakat, wakaf, dan sistem ekonomi berbasis keadilan adalah contoh lain bagaimana tata kelola Islam mendorong keseimbangan sosial. Misalnya, negara Islam harus melindungi kesejahteraan masyarakat dengan memastikan bahwa kekayaan dibagi secara adil dan bahwa kelompok-kelompok lemah dalam masyarakat aman (Al-Mawardi, 2015). Tujuannya adalah untuk menghentikan ketidaksetaraan sosial dan memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan baik, yang sejalan dengan keadilan Islam.

4. Analogi dengan Fisika: Keseimbangan Dinamis dalam Negara Islam

Mirip dengan fisika, dalam sistem yang selalu berubah, seperti hukum gerak Newton atau hukum termodinamika, keseimbangan hanya tercapai ketika semua bagian sistem bekerja bersama dan melakukan perubahan untuk mencapai keadaan stabil. Dalam pemerintahan Islam, negara berupaya menjaga keseimbangan antara kebijakan politik, kebutuhan ekonomi, dan hak-hak individu, bahkan ketika negara dan masyarakat berubah. Seperti dalam fisika, keseimbangan ini dicapai dengan melihat berbagai kekuatan yang bekerja dalam sistem, yang dalam hal ini adalah agama, negara, dan individu. Temuan studi ini menunjukkan bahwa konsep keseimbangan dalam fisika berfungsi sebagai analogi yang menarik untuk memahami dinamika pemerintahan Islam, terutama mengenai interaksi antara negara, agama, dan hak-hak individu. Dalam fisika, keseimbangan terjadi ketika dua gaya yang bekerja berlawanan bertemu untuk membuat sesuatu menjadi stabil, baik statis maupun dinamis. Hal ini terlihat jelas dalam pemerintahan Islam, yang berupaya menjaga keseimbangan antara otoritas negara dan kebebasan individu, bersamaan dengan kewajiban agama dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintahan Islam harus dinamis, artinya harus berubah seiring waktu dan kebutuhan sosial sambil tetap mengikuti aturan keadilan sosial yang ditetapkan dalam Syariah. Pemerintah Islam bertanggung jawab untuk mengelola kehidupan politik dan memastikan kesejahteraan sosial melalui kebijakan yang adil, seperti distribusi kekayaan dan pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat (Arifin, 2021).

Tujuan tata kelola Islam adalah untuk melindungi hak-hak individu, sementara kebijakan negara harus didasarkan pada kebutuhan seluruh kelompok (Yusuf, 2020). Hal ini mirip dengan teori fisika, yang menyatakan bahwa suatu sistem dinamis berada dalam keseimbangan ketika gaya-gaya yang bekerja padanya saling menyeimbangkan, bahkan seiring berjalannya waktu. Jadi, tata kelola Islam berupaya menjaga keseimbangan antara kebijakan negara, hak-hak individu, dan keadilan sosial, sekaligus beradaptasi dengan perubahan lanskap sosial dan politik.

Sistem hukum Syariah dalam tata kelola Islam merupakan cara untuk menemukan jalan tengah antara hak-hak individu dan kekuasaan negara (Hasan, 2022). Prinsip-prinsip keadilan dalam Syariah, seperti zakat dan wakaf, sangat penting untuk menjaga keseimbangan masyarakat karena memastikan bahwa kekayaan dibagi secara adil. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan sosialnya membantu semua orang, bukan hanya sebagian kecil orang.

Dalam konteks ini, keseimbangan dalam pemerintahan Islam tidak hanya mencakup stabilitas struktural tetapi juga prinsip-prinsip moral dan etika yang membentuk kebijakan pemerintah. Pemerintahan Islam mengutamakan perlindungan hak-hak individu dan memastikan bahwa kebijakan mengikuti prinsip-prinsip agama yang menjadi dasar negara (Rahman, 2023). Dengan cara ini, negara-negara Islam berupaya memastikan bahwa setiap orang dalam masyarakat memiliki hak dan manfaat yang sama, menjaga perdamaian dalam masyarakat, dan menghindari ketidaksetaraan sosial.

Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa gagasan keseimbangan dalam fisika dapat membantu kita memahami bagaimana pemerintahan Islam bekerja dan bagaimana strukturnya. Pemerintahan Islam bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara otoritas negara, hak-hak individu, dan prinsip-prinsip moral agama, mirip dengan keseimbangan yang dicapai melalui interaksi harmonis berbagai kekuatan dalam fisika (Faris, 2020).

CONCLUSION

Studi ini menunjukkan bahwa konsep keseimbangan dalam fisika dan tata kelola Islam memiliki kesamaan yang signifikan yang dapat meningkatkan pemahaman kita tentang kedua bidang tersebut. Dalam fisika, keseimbangan dicapai melalui interaksi berbagai gaya dalam suatu sistem, yang mencakup unsur statis dan dinamis. Dalam tata kelola Islam, keseimbangan antara negara dan individu, bersama dengan keseimbangan antara kewajiban agama dan hak-hak sosial, merupakan dasar fundamental untuk mencapai stabilitas sosial dan politik.

Tata kelola Islam menekankan pentingnya menemukan keseimbangan antara kekuasaan negara dan kebebasan individu. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan hukum Syariah. Negara berfungsi sebagai pengatur politik dan penjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam tata kelola Islam, negara berupaya menyeimbangkan kebijakan politik dan sosial dengan kebutuhan agama dan kebaikan masyarakat, seperti halnya dalam fisika, di mana gaya-gaya yang berlawanan bekerja bersama untuk menciptakan keseimbangan.

Kebijakan ekonomi Islam, seperti zakat dan wakaf, juga menunjukkan keseimbangan ini dengan mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa kekayaan dibagi secara adil. Dengan cara ini, negara Islam bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kekayaan dibagi secara adil dan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Selain itu, prinsip-prinsip moral dan etika Syariah berfungsi sebagai arahan untuk menegakkan stabilitas sosial, mencegah penindasan, dan melindungi hak-hak individu.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan keseimbangan dalam fisika merupakan cara yang berguna untuk memikirkan bagaimana pemerintahan Islam bekerja. Keseimbangan ini tidak hanya statis; tetapi juga dinamis, berubah seiring waktu dan kebutuhan masyarakat, sebagaimana yang dinyatakan oleh hukum Syariah.

REFERENCE

- Abdurrahman, F. (2014). The role of Islam in governance and political theory. *Islamic Journal of Governance Studies*, 12(3), 45–58.
- Al-Mawardi, A. (2015). The principles of Islamic governance: A framework for justice and equity. *Islamic Political Science Review*, 8(2), 233–247.
- Al-Qaradawi, Y. (2000). Fiqh al-hukm al-islami: Political jurisprudence in Islam. *Islamic Jurisprudence Review*, 14(1), 55–70.
- Arifin, M. (2021). Keseimbangan dalam sistem pemerintahan Islam: Dinamika dan adaptasi sosial-politik. *Journal of Islamic Political Studies*, 14(3), 198–210.
- Aslan, R. (2019). Islamic governance and social justice: An analysis of economic policies in Islamic law. *Journal of Islamic Economics*, 10(2), 82–97.
- Faris, M. (2020). Physics and governance: The interplay of dynamics and equilibrium in political systems. *Journal of Physics and Society*, 19(1), 67–82.
- Hasan, R. (2022). Hukum syariah dan keseimbangan sosial dalam pemerintahan Islam. *Journal of Islamic Governance*, 25(4), 102–115.
- Muqtadir, A. (2018). Islamic governance and the balance between individual rights and social welfare. *Journal of Islamic Law and Society*, 22(4), 198–210.
- Rahman, F. (2023). Pemerintahan Islam: Prinsip moral dan etika dalam kebijakan negara. *Islamic*

- Political Thought Review*, 8(1), 45–60.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syamsuddin, M. (2016). Islamic political thought and the state: Reconsidering the concept of balance in Islamic governance. *Islamic Political Science Review*, 8(3), 135–149.
- Yusuf, M. (2020). Pemerintahan Islam dan hak-hak individu: Menjaga keseimbangan antara kebebasan pribadi dan kepentingan kolektif. *Journal of Islamic Law and Politics*, 16(2), 123–136.